



Rastra Mulai Didistribusikan

SINGARAJA, NusaBali

Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) yang sempat mengalami keterlambatan di penghujung tahun lalu, kini sudah tuntas seratus persen. Bahkan jatah rastra di tahun 2018 ini juga sudah mulai didistribusikan di hari pertama, Senin (5/2) kemarin. Sebanyak 38.179 KK di Buleleng pun akan mendapatkan jatah rastra sebanyak sepuluh kilogram secara gratis sesuai dengan ketentuan baru.

Kepala Sub Bagian Ekonomi, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng, I Wayan Darmida menjelaskan, pendistribusian rastra secara gratis tanpa uang tebus, pasca diterimanya data penerima *by name by address* dari pemerintah pusat. "Untuk tahun ini memang ketentuannya baru. Jadi setiap KK mendapatkan jatah rastra 10 kg berkurang dari tahun sebelumnya yang 15 kg, tetapi tanpa bayar uang tebus atau gratis," kata dia.

Pendistribusian hari pertama rastra 2018 baru membagikan jatah di bulan Januari saja, yang diawali



● NUSABALI/LILIK

PENDISTRIBUSIAN rastra jatah pertama di tahun 2018 mulai dilakukan di sejumlah desa wilayah Kecamatan Sawan dan Seririt.

dengan sejumlah desa di Kecamatan Sawan dan Seririt. Seluruh rastra yang diterima masyarakat nanti langsung didrop oleh Bulog sampai ke titik distribusi di masing-masing desa.

Darmida pun mengatakan dalam perubahan peraturan ini pihaknya terus melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain

perubahan jumlah rastra yang diterima masyarakat tahun ini, juga ada sistem penerimaan dengan menggunakan voucher. Namun hingga akhir tahun 2018 nanti dari 9 Kabupaten/Kota di Bali hanya enam yang akan menerapkan sistem tersebut. Penerapannya pun akan dibagi menjadi tiga tahap.

Keenamnya meliputi

Kodya Denpasar, Kabupaten Tabanan, Gianyar, Denpasar, Jembrana, Karangasem. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan sistem voucher di tahun ini, warga penerima rastra akan mengambil jatahnya di salah satu warung di desa tersebut yang bekerjasama langsung dengan Bulog dan Pemerintah untuk melayani rastra. Warung itu nantinya disebut e-warung, sebab seluruh transaksinya menggunakan kartu voucher yang digesek di mesin.

Sedangkan tiga kabupaten lainnya meliputi Kabupaten Badung, Bangli dan Buleleng, masih menggunakan sistem penerimaan manual yang diambil di masing-masing desa. "Setelah saya koordinasi ke Provinsi, tahun ini Buleleng masih menggunakan sistem manual, karena perangkatnya yang belum ada. Mungkin nanti sambil jalan pemenuhan sarannya setelah peninjauan dari pemerintah," ungkap dia. **k23**

Edisi : Selasa, 6 Feb 2018

Hal : 4



Pembagian Dana Desa di Buleleng

Dana 79 Desa Terpangkas, 53 Desa Melonjak

**Desa Telaga,
Busungbiu,
terpangkas Rp 103
juta, sebaliknya
Desa Sidatapa,
Banjar, mengalami
peningkatan anggaran
Rp 379 juta.**

SINGARAJA, NusaBali

Besaran dana desa bagi puluhan desa di Buleleng terpangkas, akibat perubahan regulasi persentase pembagian. Kemungkinan besar akan berdampak pada program kegiatan yang telah disusun oleh desa yang bersangkutan lewat APBDes 2018.

Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng menyebut, pada tahun 2017, Kabupaten Buleleng mendapat jatah Dana Desa sebesar Rp 105.882.000. Sedangkan pada Tahun 2018, jatah Dana Desa itu naik menjadi Rp 106.882.000. Jumlah Dana

Desa itu akan didistribusikan kepada 129 desa yang ada di Buleleng.

Namun dalam pembagiannya ada perubahan regulasi. Berdasarkan ketentuan dasar yang ditetapkan Pemerintah Pusat, persentase pembagian Dana Desa kepada masing-masing desa ditetapkan sebesar 77 persen untuk alokasi dasar, kemudian 20 persen alokasi formula, dan 3 persen alokasi afirmasi. Persentase pembagian ini berbeda dengan tahun 2017, dimana alokasi dasar ditetapkan sebesar 90 persen, dan alokasi formula 10 persen.

Akibat perubahan regulasi itu, ter-

catat ada 79 desa mengalami penurunan jatah Dana Desa. Sedangkan 53 desa sisanya, mengalami kenaikan jatah Dana Desa. Salah satu desa yang mengalami penurunan jatah Dana Desa cukup drastis adalah Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu hingga Rp 103.000.000, dari Rp 812.906.828, turun menjadi Rp 709.376.000. Sedangkan desa dengan kenaikan jatah Dana Desa cukup tinggi, adalah Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, sebesar Rp 379.000.000, dari Rp 837.928.135, naik menjadi Rp 1.237.054.000.

Kepala PMD Buleleng, I Gede San-

dhiyasa ditemui di ruang kerjanya Rabu (7/2) tidak menampik, kemungkinan ada perubahan program kegiatan yang telah disusun oleh 79 desa, akibat berkurangnya jatah Dana Desa. Karena saat penyusunan program kegiatan melalui APBDes 2018, acuannya adalah pagu yang diperoleh tahun sebelumnya. "Memang kemungkinan ada pengurangan volume kegiatan, atau pergeseran kegiatan itu. Tetapi saya harap tidak sampai terjadi, karena sumber dananya bisa diambil dari ADD dan sumber pendapatan lainnya," terang Sandhiyasa.

Menurutnya, meski di satu sisi ada

pengurangan, namun di sisi lain justru ada desa yang jatah Dana Desanya naik. Terhadap desa yang bersangkutan, Sandhiyasa dapat memastikan program kegiatannya juga bertambah. "Karena ini regulasi, memang ada desa yang mendapat Dana Desa berkurang, tetapi desa-desa yang Dana Desanya naik, pasti juga alami penambahan program kegiatan," katanya.

Menurut rencana, jatah Dana Desa yang telah dalokasi kepada 129 desa segera dibuatkan Peraturan Bupati (Perbub), karena hasil verifikasi ke Gubernur sudah keluar. **k19**

Edisi : Kamis, 8 Februari 2018

Hal : A



KPU Awasi Aliran Dana Asing ke Pilgub Bali

★ Tak Laporkan Masuknya Dana Asing, Pasangan Calon Diskualifikasi

DENPASAR, NusaBali



Penggunaan dana kampanye yang berasal dari pihak asing dalam Pilgub Bali 2018 bakal diawasi ketat oleh KPU Bali dan Bawaslu Bali. Pasangan Cagub-Cawagub yang ketahuan menerima dan menggunakan dana dari pihak asing untuk kampanye dan tidak melaporkannya kepada KPU Bali, terancam diskualifikasi.

Warning ini terungkap dalam pertemuan teknis penggunaan dana kampanye Pilgub Bali 2018 yang digelar di Kantor KPU Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Selasa (6/2) siang. Rapat teknis yang dipimpin Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kemarin dihadiri pula



• NUSABALI/SUKANTA

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Rapat teknis masalah penggunaan dana dan jadwal kampanye Pilgub di Kantor KPU Bali, Selasa (6/2).

Edisi : Rabu, 7 Feb 2018

Hal : 5



KPU Awasi Aliran Dana Asing ke Pilgub Bali

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

para komisioner KPU Bali, Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia, perwakilan pasangan calon dan LO (Liaison Officer), perwakilan Polda Bali, Kesbanglispol Provinsi Bali, dan Satpol PP Provinsi Bali.

Dari perwakilan pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace), Cagub-Cawagub yang diusung PDIP-Hanura-PKPI-PAN-PKB-PPP, hadir Koordinator LO Nyoman Satria dengan didampingi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Alit Kesuma Kelakan. Sedangkan dari perwakilan pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), Cagub-Cawagub yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem-PKS-PBB, diwakili Koordinator LO Komang Sursana dan Ketua OKK DPD Demokrat Bali, I Ketut Ridet.

Selain membahas masalah dana kampanye, dalam rapat teknis di Kantor KPU Bali kemarin juga dibahas jadwal kampanye pasangan Cagub-Cawagub yang akan bertarung head to head di Pilgub Bali, 27 Juni 2018. Rapat teknis ini berlangsung selama 4 jam, mulai

pagi pukul 09.00 Wita hingga siang pukul 13.00 Wita. Jadwal kampanye dan pengundian waktu berikut wilayah kampanyenya akan diputuskan, Jumat (9/2) depan.

Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi, menegaskan soal jadwal kampanye dan penggunaan dana kampanye Pilgub Bali 2018 sudah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Kampanye. Sumber dana kampanye pun sudah diatur.

Untuk dana kampanye yang bersumber dari pasangan calon sendiri, tidak dibatasi besarnya. Sedangkan dana kampanye bersumber dari kelompok atau badan usaha swasta dibatasi maksima Rp 750 juta. Sementara dana kampanye dari perseorangan, dibatasi maksimal Rp 75 juta.

"Dilarang menerima dana kampanye dari pihak asing, baik itu negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, maupun warga negara asing. Demikian pula dana kampanye yang bersumber dari keuangan negara atau daerah seperti BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, dilarang," ujar Raka

Sandi.

Menurut Raka Sandi, dana kampanye dari pihak asing akan diawasi ketat oleh pihak-pihak berwenang, seperti Bawaslu. Ada juga tim audit independen yang dikerahkan KPU Bali. "Kalau ada penerimaan dana kampanye dari pihak asing, harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, apalagi digunakan, maka pasangan calon bersangkutan bisa didiskualifikasi," tegas Raka Sandi.

Bila ada parpol atau gabungan parpol menerima sumbangan dari pihak-pihak yang tidak dibolehkan tersebut, maka dilarang menggunakan dana dimaksud. Dana tersebut wajib dilaporkan kepada KPU Bali dan serta menyerahkan sumbangan itu ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Terkait dengan penggunaan dana kampanye secara detail, kata Raka Sandi, akan dibahas dan difinalisasi, Jumat nanti. "Hari ini (kemarin) sudah diawali pembahasannya. Masing-masing tim kampanye diberi kesempatan untuk menyusun rancangan. Nanti akan dibahas 9 Februari 2018," jelas komisioner KPU asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Men-

doyo, Jembrana ini.

Raka Sandi menyebutkan, jadwal kampanye juga sudah disusun. Nanti akan dilakukan pengundian jadwal dan siapa yang akan memulai kampanye lebih awal. Menurut Raka Sandi, pihaknya sudah menyusun dan menyepakati jadwal kampanye seluruh wilayah Bali dibagi menjadi 2, yakni hari pertama dan seterusnya. "Paslon yang dapat nomor urut 1 nanti akan diberikan jadwal kampanye pertama. Bisa paralel di kabupaten/kota, tergantung hasil undian jadwalnya nanti. Kami juga akan undang tim kampanye kabupaten/kota nanti," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengungkapkan pengawasan dana kampanye pasangan calon di Pilgub Bali 2018 sedikit lebih detail. Salah satunya, Bawaslu mendapatkan kewenangan pengawasan tanpa menunggu audit selesai.

"Kita bisa melakukan pencegahan lebih awal soal laporan penggunaan dana kampanye, tanpa menunggu tim audit independen selesai melakukan auditnya. Ini bagi kami penting juga. Kami apresiasi hal ini sebagai upaya menciptakan Pemilu yang demokratis dan Jurdil," tandas Rudia. **nat**

Edisi : Rabu, 7 Februari 2018

Hal : 1 dari 15